

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Petani Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan Model Kesesuaian Program menurut David C. Korten telah berjalan dengan baik. Menurut Korten dalam (Bahri dkk., 2020) dengan menggunakan tiga elemen, yaitu Program, Pelaksana Program dan Kelompok Sasaran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Program

Kejelasan tujuan dari program petani mandiri telah terlaksana dengan baik dan disampaikan kepada kelompok sasaran melalui sosialisasi program petani mandiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Melalui sosialisasi ini, para masyarakat yang bekerja sebagai petani diberi materi terkait dengan fungsi KPM, manfaat dari adanya KPM, dan cara mendapatkan KPM sebagai syarat untuk memperoleh manfaat PPM.

2. Pelaksana Program

Sebuah program kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika organisasi pelaksana mampu menjalankan tugas-tugas yang diperlukan untuk mengimplementasikan program tersebut dengan efektif. Pada program petani mandiri terdapat beberapa Dinas yang bertanggung jawab pada setiap manfaat

program seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan BUMdesa. Para organisasi pelaksana memiliki pemahaman dan kemampuan dasar didalam penanganan Program Petani Mandiri yang dilakukan melalui Sosialisasi terkait dengan manfaat program, pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan petani.

Dalam penelitian ditemukan bahwa kurangnya peran DPMD dalam memberikan pengembangan usaha kepada petani, petani di Desa Ngampal dan Desa Karangdowo masih belum mengetahui terkait dengan manfaat program pengembangan usaha tani yang dilakukan oleh DPMD.

3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada pelaksanaan program petani ini berfokus pada masyarakat yang bekerja sebagai petani dan telah mendaftarkan diri sebagai anggota kelompok tani dan memiliki Kartu Petani Mandiri. Penerima manfaat program petani mandiri telah disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan program yang membantu Dinas terkait sesuai dengan karakteristik dan tanggung jawabnya.

Masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan program petani mandiri, yaitu pada kesadaran masyarakat terkait dengan kewajiban membayar premi untuk asuransi gagal panen, selain itu kemampuan petani pada teknologi sehingga dalam pengajuan proposal masih terdapat kendala.

5.2 Saran

1. Pada pelaksanaan program, tambahkan program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis pertanian tetapi juga manajemen keuangan

dan pemasaran hasil pertanian. Ini akan membantu petani menjadi lebih mandiri dan mampu mengelola usaha taninya dengan lebih baik. Seperti melakukan inovasi terkait dengan Integrasikan teknologi modern dalam program, seperti penggunaan aplikasi pertanian digital untuk manajemen lahan, pemantauan cuaca, dan akses ke pasar. Ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.

2. Perlu adanya koordinasi dan sosialisasi lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan program petani mandiri, Peran Bumdesa harus lebih ditingkat di setiap desa agar mendapatkan BKK dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pemerataan manfaat PPM yaitu Pengembangan usaha tani oleh DPMD harus ditingkatkan agar pelaksanaan lebih merata.
3. Perlu adanya pendekatan personal dan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi petani dalam program. Sosialisasi harus mencakup informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai manfaat dan cara partisipasi dalam program. Pastikan informasi dan layanan terkait program mudah diakses oleh semua petani, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan lapangan, penggunaan media sosial, dan pembentukan kelompok petani yang solid.